

# INTEGRITAS MORAL DALAM KONTEKS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DESA BONTOBARU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Darmawati<sup>1</sup>, Syahril Syahril<sup>2</sup> & Inda Harianti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: oppowati76@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: immawansyahril@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: indah\_hardianti22@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui integritas moral dalam konteks pengambilan keputusan di Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian yaitu Camat Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar, Kepala Desa Bontobaru, BPD, Staff Pemerintah Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur dan tokoh masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa Integritas moral dalam konteks pengambilan keputusan di Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu belum bisa dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan musyawarah pembangunan dan musyawarah desa yang setiap saat dilakukan oleh pemerintah desa beserta elemen masyarakat dalam hal pengambilan keputusan. Selain itu, dapat dilihat juga dari beberapa hasil musrembang berupa pembangunan infrastruktur yang ada di desa serta kebijakan dalam hal pembuatan Perdes belum berjalan dengan baik dan pemberdayaan masyarakat yang telah di bentuk. Ada beberapa pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat tapi untuk saat ini pemerintah desa telah mengatasi hal tersebut dalam proses pengambilan keputusan pemerintah desa harus melibatkan BPD dan seluruh elemen masyarakat agar kebijakan yang di hasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena BPD adalah mitra kerja pemerintah desa yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan.

**Kata Kunci: Integritas Moral; Pengambilan Keputusan**

## PENDAHULUAN

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, istilah ini dapat di terapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, secara individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum, jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan membayar pajak penghasilan) kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan Interpretasi dari kebijakan.

Menurut Dye dimaknai dengan hal penting: *pertama*, bahwa haruslah dilakukan oleh badan pemerintah dan; *kedua*, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan oleh badan pemerintah dan kedua kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Selain

Dye, James E Anderson mendefenisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting dalam suatu organisasi termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran dan pemilihannya berdasarkan dampaknya, kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan ekspilist.

Kebijakan pemerintah desa sama halnya dengan kebijakan publik pada umumnya baik itu kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah kabupaten, sama-sama dibuat sebagai sama-sama dibuat sebagai pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan yang membedakannya hanya ada pada skala atau wilayahnya. Sedangkan dalam praktek pengambilan keputusan dalam hal ini kebijakan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Setiap keputusan yang diambil didahului dengan prosedur yang akhirnya sampai pada kenyataan bahwa keputusan itu penting untuk diambil. Sahnya keputusan sangat tergantung pada mereka yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yaitu siapa yang terlihat dalam proses pengambilan keputusan masyarakat mencakup semua dimensi keuasaan. Oleh karena itu, diperlukan integritas moral yang dimiliki oleh seorang pemimpin agar tetap konsisten dalam hal menentukan suatu kebijakan. Berbicara tentang integritas berarti berbicara tentang konsistensi antara dua hal yaitu pikiran dan tindakan dalam bentuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang etis melibatkan proses penalaran etis di dalamnya mengolaborasi kesadaran moral dan kemampuan moral kognitif seseorang yang pada akhirnya diwujudkan didalam proses pengambilan keputusan. Integritas dimaknai dengan prinsip loyalitas kepada prinsip dan nilai moral universal dan bukan kepada prinsip dan nilai moral yang di pegang teguh pada taraf individu, organisasi ataupun masyarakat.

Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan suatu desa yang bekerja secara serabutan dalam artian pekerjaannya tidak menetap satu pekerjaan tetapi berganti ganti dengan pekerjaan yang di butuhkan saat itu. Namun hal itu, tidak membuat partisipasi masyarkat dalam penyelenggaraan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan desa menjadi berkurang. Akan tetapi, sebaiknya itu terbukti dengan adanya Karang Taruna dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Namun hal yang berbeda terjadi di Desa Bontobaru dimana dalam penyelenggaraan peraturan-peraturan desa dan pembangunan desa, Kepala Desa seringkali mengabaikan prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan seperti dalam hal administrasi dimanipulasi data data dan rapat musyawarah desa (MUSREMGBANGDES) yang dihadiri oleh sebagian perangkat desa dan elemen masyarakat serta dalam hal pembuatan PERDES (Peraturan Desa) serta dalam hal pembuatan kebijakan lainnya sehingga menimbulkan konflik antara kepala desa, aparat desa, kepala dusun, BPD (Badan permusyawaratan Daerah) serta masyarakat.

Konflik tersebut berupa saling menyalahkan dan tidak ambil pusing ketika dalam pelaksanaan dari keputusan tersebut tidak maksimal karena bagi yang tidak di undang dalam membahas masalah tersebut masyarakat itu tanggung jawab dari orang yang ikut membahasnya dan memutuskannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya moral dan etika yang dimiliki oleh para pengambil keputusan sehingga dalam proses pengambilan tentang suatu kebijakan tidak sesuai dengan prosedur yang diinginkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan integritas moral pengambilan keputusan di Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar.

## **KAJIAN TEORI**

### **Konsep Integritas**

Menurut (Mcshane & Von Glinow) Didalam teori kepemimpinan integritas juga dipakai untuk menggambarkan kemampuan seseorang menerjemahkan perkataannya melalui tindakan nyata dengan kata lain adalah konsistensi ini menjadi kriteria yang perlu di pertimbangkan untuk di wujudkan integritas itu. Mengembangkan apa yang di mulai oleh Mc fall (1987) dan Mayer, Davis, dan Schorman (1995) Trevininyo-Rodriguez (2007) yang membahas integritas dalam kerangka klasifikasi teori sistem (*system theory*), mejelaskannya dalam kerangka individu, sosial dan organisasi. Dalam kerangka ini itegritas harus di terjemahkan apakah konteksnya mengacu pada nilai-nilai yang di pegang oleh diri sendiri, masyarakat, atau organisasi dimana seseorang berada.

Hal ini menjadikan integritas suatu hal yang relatif tergantung pada lingkup peran seseorang. Dalam sudut pandang ini, bahkan seseorang yang mangkir dari tugasnya di kantor demi pergi bertamasya untuk memuaskan kesenangan pribadi tetap dapat dikatakan berintegritas. Pengertian integritas secara umum diartikan sebagai keterpaduan kebulatan, keutuhan, jujur dan dipercaya, dan arti kata itu, kiranya manusia dikatakan berintegritas tinggi bila pribadi orang itu sehingga dapat dipercayakan dalam diri orang itu ada kesatuan beberapa aspek kemanusiaan.

### **1. Integritas sebagai Bentuk Loyalitas**

Dalam etika objektivitas, integritas di artikan sebagai loyalitas terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang rasional (Peikoff, 1991). Meski objektivisme sendiri sebenarnya mendapat banyak kritik di gunakan sebagai pondasi dasar pengembangan etika karena sifat etikanya yang egoistik dan keberatan terhadap objektivisme (dalam Barry & Stephens, 1998). Aksioma objektivisme dapat membantu mengembangkan konsep integrita, pada intinya objektivisme menekankan bahwa realitas berada terpisah dari kesadaran manusia yang berkesadaran itu berhubungan dengan realita melalui proses pembentukan konsep dan logika karena memiliki kesadaran dan akal budi. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir atau tidak berpikir dan karenanya dapat memilih alternatif-alternatif tindakan yang ada. Hal pertama yang dapat di tarik dari konsepsi objektivisme terhadap integritas adalah bahwa integritas adalah bentuk loyalitas, yaitu keteguhan hati seseorang untuk memegang prinsip dan nilai moral universal. Prinsip moral adalah norma, yaitu aturan moral yang

menganjurkan atau melarang seseorang untuk berbuat sesuatu. Dasar dari prinsip moral itu adalah moral, prinsip moral untuk tidak membunuh orang lain ataupun diri sendiri berdiri di atas pemikiran bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bernilai moral secara universal.

Kedua adalah bahwa integritas bukan tentang perkataan semata tetapi juga mencerminkan tindakan yang sejalan dengan prinsip dan nilai moral universal dan rasioanal (Becker, 1998) disini loyalitas terhadap prinsip atau nilai itu di wujudkan dalam bentuk tindakan. Loyalitas itu di tunjukkan sebagai keteguhan hati seseorang untuk bertindak sejalan dengan prinsip atau nilai yang di pegangnya. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada kemungkinan bagi seseorang untuk berubah bahkan seseorang memiliki kewajiban untuk mengubah pandangannya bila apa yang selama ini di pegang olehnya salah (Becker, 1998).

Hal ketiga integritas bukan sekedar bertindak sejalan dengan suatu prinsip atau nilai objektif yang dapat dibenarkan secara moral, pembenaran ini pun harus menggambarkan kesimpulan yang diperoleh melalui prinsip-prinsip logika (Peikoff, 1991). Bukan emos belaka, prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral adalah hal yang objektif yang konseptualisasinya di bangun melalui pengalaman nyata dan persepsi onderawi terhadap objek dan kondisi aktul (Becker; 1998). Hal itu dipercaya benar oleh individu ataupun disetujui oleh kelompok masyarakat atau organisasi tertentu integritas bukan sekedar bertindak sesuai dengan nilai yang diterima oleh individu, masyarakat, ataupun organisasi tetapi merujuk pada prinsip moral univrsal yang dapat dibenarkan secara rasional dimana kriteria-kriteria pembenaran itu opini subjektif, baik itu di taraf individu, masyarakat ataupun organisasi, tidak dapat menjadi dasar bagi integritas moral.

## **2. Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan**

Ketika di terapkan pada konsep pengambilan keputusan integritas sebagai bentuk konsistensi antara hasil keputusan yang di ambil dan tindakan aktual yang akan dilakukan. Pengambilan keputusan etis, yaitu keputusan yang berkaitan dengan nilai etis (moral) dilakukan melalui empat tahapan; sensitivitas etis, penalaran etis, motivasi etis, dan implementasi etis (Rest, 1986). Didalam model tersebut disebutnya sebagai model empat komponen (*four komponent model*), Rest menggambarkan bagaimana proses internal pengambilan keputusan etis melatarbelakangi tindakan seseorang.

Tahapan pertama, sensitivitas moral yang mengandalkan kebutuhan akan kesadaran moral atau kemampuan mengidentifikasi isu-isu moral. Didalamnya terjadi interpretasi dimana seorang individu mengenal bahwa suatu masalah moral ada di dalam situasi yang di hadapi atau bahwa suatu prinsip moral menjadi relevan di dalamnya. Tahap ini dinilai kritis karena kemampuan mengidentifikasi signifikansi moral dari suatu isu berperan besar dalam mengawali sebuah proses pengambilan keputusan yang etis dan juga perilaku yang etis.

Hasil identifikasi isu-isu moral menghasilkan suatu gambaran dilema moral beserta alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Pengambilan keputusan tindakan mana yang sebaiknya di

ambil bukanlah sebuah proses pemilihan secara acak. Pemutusan harus berdasarkan penalaran yang tepat yang memperhatikan prinsip-prinsip moral yang relevan di dalam penalaran etis. Alternatif tindakan yang telah diambil pun membutuhkan ketetapan hati maupun dorongan untuk melakukannya, itulah yang disebut motivasi etis yang kemudian diikuti oleh implementasi etis dimana alternatif tindakan yang dipilih dilakukan secara nyata

Integritas terjadi ketika implementasi tindakan yang dilakukan konsistensi dengan prinsip moral yang digunakan sebagai pegangan dalam membuat keputusan di tahap penalaran etis di dalamnya kesadaran moral berperan secara dominan. Itu sebabnya konsistensi terhadap prinsip moral disebut sebagai integritas moral. Kohlberg (1995) menekankan pentingnya perhatian kepada kesadaran moral ini untuk memahami bagaimana keputusan etis di ambil dan juga alasan etis mengapa seseorang mengambil keputusan tertentu. Satu hal yang mendasar dari konsep ini adalah kesadaran moral tidak di tentukan oleh perasaan melainkan oleh kemampuan intelektual, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengerti sesuatu cara yang rasional (Magins Suseno, 2000).

### **3. Menempatkan Kesadaran Moral di dalam Integritas Moral**

Mayer, Davis dan Schorman, (1995) dan Treviño Rodriguez (2007), para kaum objektivitas berpandangan bahwa tindakan berintegritas moral harus mengacu kepada prinsip dan nilai moral yang objektif. Terlepas dari kerangka individu, sosial, maupun organisasi, kepada prinsip dan nilai moral itu mengandalkan bahwa prinsip dan nilai moral itu berada terlepas dari kesadaran manusia sehingga eksistensinya berdiri secara otonom dari eksistensi manusia. Benard Schurink & Beer (2008), secara rinci mengidentifikasi beberapa aspek integritas pribadi, yaitu:

#### **a. Motivasi Diri dan Dorongan**

Menurut Abraham Maslow, motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik). Motivasi individu banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang di tampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya.

Dalam teori Maslow terdapat 5 pokok kebutuhan manusia yang paling mendasar, antara lain: 1) kebutuhan fisiologis; 2) kebutuhan keamanan dan keselamatan; 3) kebutuhan akan rasa cinta; 4) kebutuhan penghargaan; dan 5) kebutuhan penghargaan. Konsep keberanian menggambarkan kemampuan Individu yang menghadapi bahaya, ketidakpastian, dan tantangan dan mengatasi mereka tanpa rasa takut. Sedangkan keberanian moral adalah tindakan kemuliaan (tindakan kebijakan) dalam menghadapi tantangan moral (Seserka, Bagozzi & Charnigo, 2009).

#### **b. Keberanian Moral Dan ketegasan**

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati yang menyatakan diri dalam kesediaan untuk mengambil resiko konflik. Keberanian moral tidak menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan yang ada kalau itu berarti mengkompromikan kebenaran dan sedangkan ada

tiga prinsip dasar moral yang harus kita miliki: 1) prinsip sikap baik; 2) prinsip keadilan; dan 3) prinsip hormat terhadap diri sendiri. Sedangkan menurut Farnz Magnis keberanian moral adalah kekuatan kepribadian seseorang yang mantap dalam kesanggupannya untuk bertindak sesuai dengan apa yang diyakininya sebagai benar dalam diri kita dengan menunjang kekuatan moral. Menurut Franz ada beberapa cara memperoleh sikap-sikap yang menunjang kekuatan moral dalam diri kita antara lain kejujuran, ketersediaan untuk bertanggung jawab, kemandirian moral, keberanian moral, dan kerendahan hati

c. Kejujuran

Menurut Kesuma, dkk (2012: 16) jujur merupakan suatu keputusan seseorang untuk mengungkapkan perasaannya, kata-katanya atau perbuatannya bahwa realitas yang ada tidak dimanipulasi dengan cara berbohong atau menipu orang lain untuk keuntungannya diri sendiri. Makna jujur erat kaitannya dengan kebaikan (kemashlahatan) kemashlahatan memiliki arti bahwa mementingkan kepentingan orang banyak dari pada mementingkan diri sendiri maupun kelompoknya. Menurut Mustari (2011:13-15) jujur adalah suatu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lainnya, jujur merupakan suatu karakter.

d. Konsistensi

Menurut Reza M Syarif (2005) konsisten adalah fokus pada suatu bidang yang man kita tidak akan berpindah menuju bidang lain sebelum pondasi bidang pertama benar-benar kuat. Sedangkan defenisi konsisten dalam kewirausahaan adalah kedaulatan tekad untuk tetap terus menjalankan usahanya dengan menghadapi berbagai rintangan yang ada di masa kini dan nanti.

Menurut Cambrige Dictionary, konsisten adalah sesuatu yang tidak berubah atau selalu berbuat atau terjadi dengan cara yang sama terutama dalam hal yang positif. Dalam kehidupan sehari-hari konsisten sangat berhubungan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang, mereka yang sering berbuat plin plan bukanlah orang yang konsisten.

e. Komitmen

Menurut Soekidjang (2009), komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan prioritas dengan tujuan pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi, hal ini mencakup cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi daripada kepentingan pribadi. Menurut Meyer dan Allen (dalam Soekdjan 2009) komitmen dapat juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut. Menurut Van Dyne & Graham (dalam Muchlas, 2008) faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi adalah personal, situasional dan posisi, personal mempunyai posisi, personal mempunyai ciri-ciri kepribadian positif (optimis) dan cenderung lebih komitmen.

### **Pengambilan Keputusan oleh Kepala Desa**

Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar peranannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas seorang pemimpin. Sehingga seorang pemimpin yang tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin, Oleh sebab itu, untuk mengetahui baik tidaknya keputusan yang di ambil bukan hanya di nilai dari konsekuensi yang di timbulkannya (Rivai, 2007:151). Dalam pelaksanaannya, pengambilan keputusan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu proses dan gaya pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan dilakukan beberapa langkah berikut: 1) identifikasi masalah; 2) mendefinisikan masalah; 3) memformulasikan dan mengembangkan alternatif; 4) implementasi keputusan; dan 5) evaluasi keputusan.

Sedangkan terkait dengan gaya pengambilan keputusan terdapat beberapa jenis sebagai berikut:

1. *Direktif*: toleransi ambiguitas rendah dan mencari rasionalitas. Efisiensi mengambil keputusan secara cepat dan berorientasi jangka pendek;
2. *Analitik*: toleransi ambiguitas tinggi dan mencari rasionalitas, pengambil keputusan yang cermat, mampu menyelesaikan diri dengan situasi baru;
3. *Konseptual*: toleransi ambiguitas tinggi dan intuitif, berorientasi jangka panjang sering kali menekan solusi kreatif atas masalah
4. *Behavioral*: toleransi ambiguitas rendah dan intuitif, mencoba menghindari konflik dan mengupayakan penerimaan.

### **Konsep Perumusan Kebijakan Desa**

Perumusan (formulasi) kebijakan masyarakat merupakan salah satu proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan masyarakat. Para ahli mengemukakan pandangan tentang resolusi formulasi kebijakan masyarakat sebagai berikut:

1. Menurut Dunn (2000: 132) perumusan kebijakan (kebijakan perumusan) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah;
2. Winarno (2002: 29) menyatakan itu masing-masing alternatif-alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan dalam kerangka untuk memecahkan suatu masalah;
3. Tjokromidjojo dalam Islami (2000: 24) menyebutkan perumusan sebagai alternatif yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam sungguh proses perumusan kebijakan kita perlu mempertimbangkan aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan.

Berdasarkan pengertian pendapat para ahli di *defferences* dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan cara untuk penyelesaian suatu masalah yang di bentuk oleh para aktor pembuat kebijakan pada masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih

alternatif kebijakan yang terbaik. Ada beberapa langkah dalam proses perumusan kebijakan publik yaitu: 1) identifikasi masalah (mengidentifikasi masalah); 2) jadwal acara kebijakan dan prioritas masalah; 3) pemilihan alternative kebijakan untuk memecahkan masalah; dan 4) Tahap penetapan kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara dokumentasi. Informan penelitian yaitu Camat Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar, Kepala Desa Bontobaru, BPD, Staff Pemerintah Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur dan tokoh masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Integritas Moral Dalam Konteks pengambilan keputusan di Desa Bontobaru**

#### **1. Motivasi Diri dan Dorongan**

Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik). Motivasi individu banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang di tinkalkannya ,baik dalam konteks belajar ,bekerja maupun dalam kehidupan lainnya.

Integritas moral dalam konteks pengambilan keputusan dari segi motivasi diri yang dimiliki oleh Pemerintah Desa belum bisa dikatakan baik. Disisi lain, pernah terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa terkait MUSRENGBANG tetapi semua itu bisa teratasi karena bentuk dukungan dan saran dari masyarakat untuk kedepannya. Tetapi dalam hal administrasi terkait perencanaan, penyiapan sarana dan prasarana, motivasi diri yang dimiliki oleh pemerintah desa beserta para staff nya belum bisa dikatakan baik karena yang menjadi masalah adalah BUMDES tersebut sudah tidak aktif atau bisa dikatakan sudah vakum dan tidak lagi di rasakan langsung oleh masyarakat Desa Bontobaru sampai sekarang, alasannya karena dalam proses penguatan kualitas pengurus. Persoalan ini sementara diusahakan oleh pemerintah desa agar BUMDES tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi perlu ada peningkatan motivasi diri yang dimiliki oleh Kepala Desa agar seluruh kegiatan yang ada di desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

#### **2. Keberanian Moral dan Ketegasan**

Keberanian moral adalah kekuatan kepribadian seseorang yang mantap dalam kesanggupannya untuk bertindak sesuai dengan apa yang diyakininya sebagai benar dalam diri kita dengan menunjang kekuatan moral. Ketegasan adalah kepastian yang dimiliki oleh individu nyata,

**Darmawati<sup>1</sup>, Syahril Syahril<sup>2</sup> & Inda Harianti<sup>3</sup>**

jelas, tidak ragu-ragu salah satu nilai kepemimpinan yang mutlak diperlukan oleh seorang pemimpin yang majemuk. Ketegasan merupakan sebuah sikap terhadap sesuatu hal dimana seorang pemimpin menerangkan, menjelaskan dengan pasti, nyata dan dan jelas terhadap sesuatu hal.

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh staf Desa masih sangat Minim bisa kita lihat dari Tabel dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh staf Desa Bontobaru**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Daeng Malimbang	Kepala desa	Sma
2	Muh ashar eka Saputra S.Pd.I	Sekretaris desa	S1
3	Syahrudin	Kasi pemerintahan	Sma
4	Suharti	Kasi kesejahteraan	Smp
5	Sannawiyah	Kasi pelayanan	Smp
6	Lina harlina	Kaur tu dan umum	Sma
7	Fatmawati	Kaur perencanaan	Smp
8	Andi nur malik	Staf kasi kesejahteraan	Sma
9	Muhammad rakil	Staf kasi pemerintahan	Sma
10	Andi kasman	Staf kasi kesejahteraan	Smp
11	Abd. Rahmat	Staf kasi pelayanan	Smp
12	Nur halifa	Staf kaur tu/umum	Smp
13	Baso alang	Staf kaur perencanaan	Smp
14	Syahril	Staf kaur keuangan	Sma
15	Andi murniati	Petugas registrasi	Sma
16	Dedi miswar	Operator lainnya	Sma
17	Ahmad basman	Operator siskuedes	Smp
18	Nurhaedah	Petugas perpustakawan	Smp

Sumber: Profil Desa Tahun 2020

Integritas moral dalam hal pengambilan keputusan dilihat dari segi keberanian moral dan ketegasan yang dimiliki oleh pemerintah desa khususnya Desa Bontobaru sudah sangat tegas. Ada aturan-aturan yang dipakai itulah keberanian dan ketegasan pemerintah dalam mengambil keputusan sehingga tercipta suasana yang damai sejahtera masyarakatnya tidak ada tumpang tindih, tidak ada konflik di dalamnya. Pemerintah desa sangat berani dan tegas dalam menentukan sebuah kebijakan dari beberapa usulan masyarakat, disini dapat kita lihat dari beberapa pembangunan yang telah di bangun oleh pemerintah desa. Hanya saja, memang pernah terjadi konflik antara masyarakat, BPD, dan pemerintah desa pada saat itu terkait masalah SDM pegawai desa sangat minim. Langkah yang dilakukan adalah ketika dalam proses perekrutan staf desa hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh pemerintah desa adalah memilih pegawai desa yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi agar dalam proses pelaksanaan kegiatan di desa bisa berjalan baik dan para staff desa bisa berinovasi agar desa dapat maju dan masyarakat bisa sejahtera.

### **3. Kejujuran**

Menurut kesuma (2012: 16) jujur merupakan suatu keputusan seseorang untuk mengungkapkan perasaannya dan kata-katanya atau perbuatannya bahwa realitas yang ada tidak dimanipulasi dengan cara berbohong atau menipu orang lain untuk keuntungannya diri sendiri. Makna jujur erat kaitannya dengan kebaikan (kemashlahatan) yang memiliki arti bahwa mementingkan kepentingan orang banyak daripada mementingkan diri sendiri maupun kelompoknya.

Integritas moral dalam konteks pengambilan keputusan di lihat dari segi kejujuran berdasarkan hasil observasi saya bahwa pemerintah desa sudah cukup baik saya lihat pembangunan infrastruktur sudah ada serta pemberdayaan masyarakat juga terlaksana. Hanya saja mekanisme pengambilan keputusan di desa sudah berjalan namun belum maksimal seperti yang diharapkan karena memang butuh waktu. Ada beberapa kendala yang dihadapi pertama adalah sumber daya manusia yang sangat lemah karena masih banyak kepala dusun serta para pembantu kepala desa dalam hal ini staf desa tidak mampu menjabarkan apa keinginan-keinginan kepala desa sehingga anggota atau staffnya ini kadang kebingungan tidak terstruktur cara kerjanya tidak sistematis sehingga outputnya juga tidak menyentuh kebawa.

### **4. Konsisten**

Menurut Cambridge Dictionary, konsisten adalah sesuatu yang tidak berubah atau selalu berbuat atau terjadi dengan cara yang sama terutama dalam hal yang positif. Dalam kehidupan sehari-hari konsisten sangat berhubungan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang, mereka yang sering berbuat plin plan bukanlah orang yang konsisten.

Integritas moral dalam konteks pengambilan keputusan oleh pemerintah desa dapat dilihat dari segi konsisten, pemerintah desa sangat konsisten dengan keputusan yang di ambil di lihat dari beberapa pembangunan yang telah dilaksanakan. Hanya saja memang pernah ada beberapa pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat contohnya masyarakat membutuhkan pembangunan tanggul tetapi yang di bangun adalah saluran air. Pemerintah desa akan mengatasi hal tersebut, dengan menjanjikan kepada masyarakat agar pembangunan tanggul tersebut agar segera dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah desa sangat membutuhkan partisipasi masyarakat agar terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.

### **5. Komitmen**

Menurut (Soekidjang, 2009), komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan prioritas dengan tujuan pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara mengembangkan tujuan organisasi, dengan mendahulukan misi organisasi daripada kepentingan pribadi.

Integritas Moral dalam konteks pengambilan keputusan di Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar sudah cukup baik. Hal ini bisa di lihat dari

beberapa kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah desa dari segi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Hanya saja ada beberapa bangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hal ini di anggap oleh masyarakat pemborosan anggaran, pemerintah Desa berusaha untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada baik dari segi pembentukan BUMDES pemerintah desa Bontobaru sementara melakukan penguatan struktural.

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian melalui tehnik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi menyimpulkan bahwa integritas moral dalam konteks pengambilan keputusan Di Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur di lihat dari segi motivasi diri dan dorongan, keberanian moral dan ketegasan, kejujuran, konsisten dan komitmen masih perlu adanya peningkatan oleh kepala desa dalam proses pengambilan keputusan di desa khususnya Desa Bontobaru. Mekanisme pengambilan keputusan di Desa Bontobaru bisa dikatakan sudah berjalan namun belum maksimal seperti yang diharapkan, kendala yang di hadapi adalah sumber daya manusia yang sangat lemah. Terkait masalah pembangunan dan pemberdayaan, ada beberapa pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembentukan BUMDES serta pemberdayaan masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan, dan majelis ta'lim yang sudah vakum, sementara ini pemerintah desa beserta staffnya dalam proses penguatan struktural.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin, A., & Arifin, Z. . (2020). Perencanaan Pengembangan Desa Ekowisata Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal (Study Kasus Desa Tongke – Tongke). *Jurnal Ilmiah Administrasita* , 11(1), 16–24. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v11i1.66>
- Arifin, Z. . (2021). Pengawasan Dewan Pendidikan Dalam Proses Penerimaan Peserta Didik Berbasis Zonasi Tingkat SD Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita* , 12(1), 33–45. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v12i1.329>
- Anggara ,Wisesa. (2001). “*Integritas Moral dalam konteks pengambilan keputusan Etis*” *Jurnal Manajemen Teknologi*. Volume 10 Number 1, pp82-92, Sekolah Bisnis dan manajemen institut Teknologi Bandung.
- Bernard, A, Shurink, W.,Dee Beer, M.(2008). *A Conceptussl Frameworkof Integrity. Journal of Psychology*. (2001) 34 (2), 40-49
- Berry C,M, sacket, P, R, Dan Wieman .. s (2008), *A Conseptussl Framaworkraf integrity , journal of (2010) Psychology* , 34 (2) ,40-49
- Bolden, R, Glosing j., Matturanro , a . and Dennision , P .2003, *A Review of Leadership studies* , university of Exeter , UK
- De George ,R,T(1993). *Competing with integrity international Business*. New York:Oxford University press
- David G. Gulanic. 1959. *Webster’s World Dictonary of American language* New York: *The World publishing company*.
- Jacobs, D.C. (2004), “*A pragmatist approach to integrity in bussiness ethics*”, *Journal of management Inquiry*, Vol.13 Issue 3,pp215-223.

- Kaha, Henrikud Likusiana, 2007 peran BPD dalam pengambilan keputusan Desa pembangunan di Desa (studi kasus di Desa kelurahan sumberarum kecamatan mayudan sleman ) Tesis
- Nursaiyallah, & Arifin, Z. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) IV pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya MANUSIA Aparatur (BKPSDMA) Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 10(2), 106–119. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v10i2.147>
- One s D.S Visweswaran, C., dan schimidt, F. L (1995). “*Integrity Test:Overlooked facst, Resolved Issues, and Reaming Que stions*” *American psychologist*, vol.
- Robiyati podunggae dan Moh Agussalim motnorfa, 2014 “ *integrity test, overlooked facst, Resolved issue ,and Reaming Questions* “ *American psycologist*, vol
- Soekidjan, (2009) Manajemen sumber Daya Manusia.Jakarta Bumi AksaraSimon, A. Hebert, (2004), *Administratif Behavior. perilaku Administrasi: suatu studi tentang proses pengambilan keputusan dalam organisasiAdministratif*, Edisi ketiga,cetakan keempat, Ahli Bahasa ST, Dianjung Bumi Aksara, jakarta
- Solomon, R.C. (1992). *Ethics and Excellence: Coperation and integrity in bussiness, /New York: Oxford University Press*
- Suseno, Franz Magnis, 1987. *Etika Dasar: Masalah-masalah pokok Filsafat Moralyogyakarta: Kansius*
- Trevino – Rodriguez ,R, N (2007). ”*Integrity A sistem Theory classification for research Education and Management* “ *Journal of business Ethis* Vol 11 pp 445-59.
- Yukl, G, A dan van fleet ,D.D (1992) “ *Theory And Research on Leadership in organization*” di dalam Dunnette, M. D dan Hough, L. M (Ed), *Handbook of industrial & Organizational psychology, ed, Vol 3, plato Alto: consilting psychologistist.*